

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBINAAN INDUSTRI
MEBEL DI KABUPATEN JEPARA**

Andini Febby Damayanti, Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id>
email fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

Jejara Regency is known as "Jejara City of Carving" and The World Carving Center with furniture production with an export value in 2024 of 302.7 million US dollars with 3,945 furniture industry units and 57% of the total population aged 15 years and over involved in manufacturing businesses, especially carved furniture businesses. To protect and guarantee the existence of carved furniture as the main commodity of the region, the Jejara Regency Government issued Jejara Regency Regional Regulation Number 2 of 2014 concerning Protection, Empowerment, and Development of the Furniture Industry. This study will focus on How the Implementation of Jejara Regency Regional Regulation Number 2 of 2014 concerning Empowerment, Protection, and Development of the Furniture Industry related to the Skills Improvement Program in Various Education and Training in Jejara Regency and the supporting factors or inhibiting factors. The method used is a qualitative phenomenological method, with interviews. The results of the analysis show that the implementation of Jejara Regency Regional Regulation Number 2 of 2014 concerning Empowerment, Protection, and Development of the Furniture Industry related to the Skills Improvement Program in Various Education and Training in Jejara Regency is still not optimal. This is influenced by the low level of participation of furniture entrepreneurs and the younger generation. The wages of carved furniture workers are relatively low, the difficulty of marketing and raw materials for carved furniture businesses and the large capital needed to start a carving business, the ability of SMK 2 Jejara graduates majoring in carving and young carvers is still lacking. Meanwhile, factors that support the sustainability of the implementation of these regulations are the existence of easily accessible SOPs, budget availability, good and effective communication, and the strong commitment of the Jejara Regency Government..

Keywords: *Implementation, regeneration crisis, furniture industry*

ABSTRAK

Kabupaten Jejara dikenal dengan sebutan "Jejara Kota Ukir" dan *The World Carving Center* dengan produksi mebel dengan nilai ekspor pada tahun 2024 sebesar 302,7 Juta Dolar AS dengan 3.945 unit industri mebel dan 57% dari keseluruhan penduduk yang berumur 15 tahun

keatas terlibat dalam usaha manufaktur khususnya usaha mebel seni ukir. Untuk melindungi dan menjamin keberadaan mebel seni ukir sebagai komoditas utama daerah Pemerintah Kabupaten Jepara mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel. Penelitian ini akan berfokus pada Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel terkait Program Peningkatan Keterampilan Dalam Berbagai Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Jepara dan faktor pendukung atau faktor penghambatnya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif fenomenologi, dengan wawancara. Hasil analisis menunjukkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel terkait Program Peningkatan Keterampilan Dalam Berbagai Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Jepara masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat partisipasi para pengusaha mebel dan generasi muda yang rendah. Upah pekerja mebel seni ukir yang relatif rendah, sulitnya pemasaran dan bahan baku usaha mebel seni ukir dan modal yang cukup besar untuk memulai usaha seni ukir, kemampuan lulusan SMK 2 Jepara jurusan seni ukir dan para pengukir muda yang masih kurang. Sedangkan faktor yang mendukung keberlangsungan implementasi peraturan tersebut adalah keberadaan SOP yang mudah diakses, ketersediaan anggaran, komunikasi yang baik dan efektif, serta komitmen Pemerintah Kabupaten Jepara yang kuat.

Kata Kunci: Implementasi, krisis regenerasi, industri mebel

PENDAHULUAN

Mebel dapat dipahami sebagai peralatan rumah tangga khususnya barang-barang yang biasanya melengkapi kebutuhan rumah. Kata mebel bukanlah kata murni dari Indonesia melainkan kata serapan dari bahasa prancis “furniture”. Biasanya mebel merujuk pada barang-barang besar dari kayu, plastik, logam, kaca bahkan bahan-bahan tekstil yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan rumah. Permebelan di Kabupaten Jepara sudah menjadi identitas daerah yang dikenali oleh masyarakat Indonesia.

Kabupaten Jepara menjadi daerah produsen dan pemasok barang mebel yang besar dengan ciri khas ukirannya yang

menyentuh nilai ekspor hingga 302,7 Juta Dolar AS (Pemerintah Kabupaten Jepara, 2024). Mebel dengan ciri khas ukiran kayu menjadi sumber pendapatan utama dalam perekonomian masyarakat Jepara. Masyarakat Jepara rata-rata memiliki industri mebel, kios, ataupun bengkel mebel yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Jepara (Kristiana, 2017). Data BPS Kabupaten Jepara tahun 2019 menunjukkan terdapat 3.945unit industri mebel.

Kecamatan	Potensi														Jumlah/ Total
	Mebel	Kerajinan Kayu	Kerajinan Rotan	Konveksi	Tenun	Batik	Makanan	Mainan Anak	Rokok	Kulit	Manis	Genteng	Gerabah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1. Kidung	113	-	-	9	-	-	36	-	-	-	-	-	-	158	
2. Pecangaan	269	33	12	56	631	2	415	2	-	6	51	-	7	1.484	
3. Kalinyamatan	10	3	3	478	-	-	205	-	19	5	157	-	162	1.042	
4. Welahan	4	8	11	18	-	-	49	20	-	-	2	-	25	137	
5. Mayong	-	-	-	13	-	-	32	-	-	-	-	40	9	94	
6. Nalumsari	54	-	-	29	-	-	12	-	-	-	-	-	33	128	
7. Batealit	34	5	-	19	-	5	71	-	-	-	-	-	-	134	
8. Tahunan	2.938	48	12	6	-	-	23	-	-	-	-	-	-	3.027	
9. Jepara	405	202	-	-	-	-	133	-	-	-	-	-	-	740	
10. Mlonggo	118	21	-	3	-	-	43	-	-	-	-	-	-	185	
11. Pakis Aji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
12. Bangsri	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	110	
13. Kembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
14. Kelling	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	12	
15. Donorojo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
16. Kartimunjawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Jumlah	3.945	320	38	631	631	7	1.141	22	19	11	210	40	236	7.251	

Tabel Data Industri berdasarkan Jenisnya
Tahun 2019

Sumber: BPS Kab. Jepara, 2019

Industri pengolahan didefinisikan sebagai jenis industri yang di dalamnya terdapat kegiatan yang bertujuan untuk mengubah bahan-bahan atau sumber daya yang ada menjadi barang jadi atau barang setengah jadi ataupun barang yang nilainya kurang menjadi barang bernilai tinggi (BPS Kab. Jepara, 2019). Lebih lanjut, industri pengolahan dijelaskan terdiri dari :

1. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional;
2. Industri Karet;
3. Industri Barang Galian bukan Logam;
4. Industri Barang dan Logam, serta Peralatan Listrik;
5. Industri Permesinan;
6. Industri Peralatan Angkutan;
7. Industri Furniture;
8. Dan industri pengolahan lainnya.

Adapun Pemerintah Kabupaten Jepara telah mengeluarkan kebijakan terkait Perlindungan dan membuat sejumlah program, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel, keberlangsungan industri mebel di Kabupaten Jepara masih menemui beberapa permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut yaitu:

1. Permasalahan yang paling umum dialami oleh para pelaku usaha mebel adalah ketersediaan modal yang menjadi salah satu sumber daya dalam proses produksi (Diva Molanda, 2023), permasalahan ini menjadi serius disaat pelaku usaha mebel mulai kehabisan modal dalam melakukan produksi sehingga tidak dapat membiayai kegiatan operasional produksi mebel yang mengakibatkan usaha tersebut harus gulung tikar, contohnya pada saat covid 2020 dimana kebijakan ekspor impor sangat dibatasi bahkan segala kegiatan mengalami pembatasan yang cukup ketat sehingga menghambat keberlangsungan usaha mebel.
2. Permasalahan selanjutnya adalah berkaitan dengan mulai menjamurnya pabrik garmen di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Jepara, dengan upah minimum kabupaten/kota sebesar 2,1 juta perbulan para pengrajin mebel lebih memilih untuk pindah Haluan menjadi pekerja pabrik garmen dengan alasan kenyamanan serta kestabilan gaji (Yasmine, 2021).

3. Krisis regenerasi pengukir mebel, krisis tersebut terjadi karena beberapa hal yaitu:
 - a. Proses sosialisasi dari generasi sebelumnya ke generasi penerus yang tidak sempurna;
 - b. Pendapatan seorang pengrajin ukir yang dinilai terlalu minim;
 - c. Pilihan alternatif pekerjaan yang cukup bervariasi dan lebih menjanjikan saat ini;
 - d. Program pemerintah yang dinilai masih belum tepat sasaran.

Dari beberapa permasalahan dalam proses implementasi program-program tersebut, permasalahan yang cukup mengkhawatirkan adalah krisis regenerasi pengusaha mebel ukir. Kemudian berkaitan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mengatasi krisis regenerasi tersebut adalah dengan Pendidikan dan pelatihan seni ukir. Pelayanan Pendidikan dan kepemudaan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2026 telah dimasukkan kedalam permasalahan pokok yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Jepara untuk kurun waktu 2023 – 2026.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2

Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel Kabupaten Jepara dalam Program Peningkatan Keterampilan Dalam Berbagai Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Jepara?

2. Apa saja Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel

. KAJIAN TEORI

1) Administrasi Publik

Ilmu administrasi publik adalah ilmu yang berkaitan dengan sistem manajemen pemerintahan yang didalamnya mencakup kebijakan sampai dengan pelayanan masyarakat atau publik. Marx (dalam Pasolong, 2012) mengartikan administrasi

publik sebagai sebuah tindakan yang diputuskan dalam rangka pencapaian tujuan dan dilakukan secara penuh. Kemudian, L.D. White (dalam Keban, Yermias, 2014) mendefinisikan administrasi publik sebagai kegiatan operasional dalam sebuah negara dengan tujuan untuk menjalankan kebijakan publik yang telah disusun.

2) Implementasi Kebijakan

Kebijakan seringkali diidentikan dengan peraturan yang mengikat dan public merupakan subjek dari peraturan tersebut. Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan publik dan bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok (Rusli, 2013). Implementasi kebijakan berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan peraturan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi (dalam Winarno, 2012) Menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah kegiatan atau aktivitas dalam keputusan yang telah dibuat sebelumnya yang mencakup langkah-langkah dalam upaya merealisasikan keputusan yang telah dibuat tersebut menjadi sebuah kegiatan atau tindakan operasional dengan jangka waktu khusus atau dalam rangka melanjutkan langkah-langkah sebelumnya dalam rangka menciptakan sebuah perubahan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas Secara garis besar, Implementasi Kebijakan ada setelah sebuah peraturan atau keputusan ditetapkan dan berfokus pada langkah atau upaya untuk mendukung keterwujudan keputusan atau peraturan tersebut.

3. Pemberdayaan, Perlindungan Dan Pembinaan Mebel

A. Pemberdayaan

Pemberdayaan industri mebel dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja pelaku usaha industri mebel, meningkatkan standar kualitas industri mebel serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan para pelaku usaha mebel kecil dan menengah agar mampu mandiri berdaya saing tinggi.

B. Pembinaan

Pembinaan terhadap pelaku atau tenaga kerja mebel dilakukan dalam bentuk

1. Membimbing pelaku dengan kepentingan pelaku usaha.
2. Mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, usaha mebel yang sesuai 13 pelatihan, penyuluhan, dan penelitian permebelan; yang saling menguntungkan antar pelaku usaha mebel;
3. Membantu mengembangkan jaringan usaha mebel dan kerjasama memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mebel.

4. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mebel.

4. Model – Model Implementasi Kebijakan

1) Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Edward III melihat keberhasilan implementasi kebijakan melalui 4 variabel yaitu:

a. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan 2 hal yaitu mekanisme dan struktur organisasi.

b. Sumber Daya

Penyelenggaraan sebuah kebijakan dapat berjalan dengan adanya dukungan sumber daya.

c. Komunikasi

Sebuah pelaksanaan kebijakan akan dapat berjalan dengan lancar apabila terdapat pola komunikasi yang baik dan efektif dalam pelaksanaannya.

d. Disposisi

Kebijakan biasanya menunjukkan karakter dari sebuah organisasi dan tujuannya.

2) Model Implementasi G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondenelli

Menurut Cheema, terdapat 4 variabel yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya

organisasi untuk implementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

3) Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

a. Standar Kebijakan

b. Sumber daya

c. Karakteristik organisasi pelaksana

d. Sikap para pelaksana

e. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

5. Pemberdayaan, Perlindungan Dan Pembinaan Mebel

a. Pemberdayaan

Pemberdayaan industri mebel dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja pelaku usaha industri mebel, meningkatkan standar kualitas industri mebel serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan para pelaku usaha mebel kecil dan menengah agar mampu mandiri berdaya saing tinggi.

b. Pembinaan

Pembinaan terhadap pelaku atau tenaga kerja mebel dilakukan dalam bentuk

1. Membimbing pelaku dengan kepentingan pelaku usaha.
2. Mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, usaha mebel yang sesuai 13 pelatihan, penyuluhan, dan penelitian permebelan; yang saling menguntungkan antar pelaku usaha mebel;
3. Membantu mengembangkan jaringan usaha mebel dan kerjasama memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mebel.
4. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mebel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Seperti yang dijelaskan oleh John W. Creswell di dalam bukunya yang berjudul *Qualitative Inquiry and Research Design* "Data yang dikumpulkan adalah dari individu yang telah mengalami fenomena tersebut. Sering kali pengumpulan data dalam studi fenomenologis dilakukan melalui wawancara yang mendalam dengan para partisipan (Creswell, 2009)." Penelitian bertujuan untuk mendapatkan data

deskriptif tentang fenomena yang sedang terjadi. Metode Analisis yang digunakan:

1. Analisis isi: Analisis isi digunakan untuk menganalisis teks, gambar, atau video.
2. Analisis Tematik: Digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dalam data.
3. Analisis Naratif: Digunakan untuk menganalisis cerita atau pengalaman pada individu. Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara. Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini diantaranya adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui informan yang telah ditetapkan oleh peneliti, diantaranya adalah Kepala Bidang Perindustrian Disperindag Kabupaten Jepara dan Staff teknis yang menangani, serta perwakilan pengusaha mebel.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data-data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yaitu data-data yang diperoleh dari buku, *literature*, jurnal, dan artikel dari berbagai media.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti untuk memperoleh data adalah:

1. Observasi Partisipatif

Metode pengamatan dilakukan dengan mengamati perilaku, peristiwa, atau aktivitas orang atau kelompok yang disurvei. Tuliskan pengamatan ini dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan antara peneliti dengan yang subjek penelitian untuk menggali lebih dalam lagi data yang didapat dari observasi.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara Pada Program Peningkatan Keterampilan Dalam Berbagai Pendidikan Dan Pelatihan

BPS Kabupaten Jepara mencatat bahwa 57% dari keseluruhan penduduk yang berumur 15 tahun keatas cenderung bergabung dalam usaha manufaktur khususnya industri mebel. BPS Kabupaten Jepara juga mencatat pada data terakhir jumlah usaha industri mebel di Kabupaten Jepara mencapai 3.945 unit. Jumlah yang cukup besar yang membuat Kabupaten Jepara menjadi Daerah sentra mebel. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel.

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang terdiri dari 4 variabel, yaitu Struktur Birokrasi, Sumber Daya, Komunikasi dan Disposisi.

Peraturan tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui bentuk program dan kegiatan sebagai bentuk nyata pelaksanaan regulasi. Adapun beberapa program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program penyediaan bahan baku (kegiatan budidaya Jati Unggul Nusantara, Gerakan Rehabilitasi Hutan, serta Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat)
2. Program fasilitasi permodalan bagi pengusaha mebel (berupa bantuan modal, hibah, dan bantuan sarana prasarana)
3. Program Fasilitasi pemasaran melalui kegiatan pameran, fasilitasi hak paten dan pembuatan branding daerah;
4. Program peningkatan keterampilan dalam berbagai Pendidikan dan pelatihan salah satunya adalah melalui Balai Pelatihan Kerja dan jurusan seni dalam Pendidikan formal Tingkat SMK

5. Program fasilitasi infrastruktur pendukung baik penguatan jalan sebagai akses pemasaran, penguatan sentra industri dan desa wisata.

Seluruh program tersebut merupakan bentuk komitmen dari Pemerintah Kabupaten Jepara untuk dapat menjaga eksistensi usaha industri mebel Kabupaten Jepara.

Kemudian terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara terdapat program lainnya :

- a. Pengembangan Program Pelatihan dan Pemagangan

Berdasarkan hasil wawancara terkait, pengembangan program pelatihan dan pemagangan, dapat diketahui bahwa program pelatihan yang dilaksanakan oleh DISPERINDAG Kabupaten Jepara sangat beragam dan selalu diadakan setiap tahun. Penyelenggaraan pelatihan tidak hanya berasal dari DISPERINDAG namun juga melibatkan sektor swasta, akademisi. Saat ini, minat ikut serta masyarakat dalam pelatihan yang digelar tersebut semakin hari semakin menurun karena minat masyarakat telah berganti. Masyarakat yang tergolong kedalam usia produktif dengan persentase 68,65% dari

keseluruhan masyarakat Jepara lebih memilih untuk merantau atau bekerja di pabrik sekitaran Kabupaten Jepara. Penyelenggaraan pelatihan tidak hanya berhenti pada proses pelaksanaannya saja, namun dinas-dinas terkait juga melakukan monitoring evaluasi kepada para pengusaha mebel. Sedangkan untuk pengembangan pemagangan secara formal, Pemerintah Kabupaten Jepara telah membuka jurusan kelas seni ukir kreatif untuk memfasilitasi siswa-siswi yang berminat dalam menekuni industri seni ukir kreatif tersebut. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jepara juga membuka kesempatan bagi masyarakat diluar Kabupaten Jepara yang berminat untuk melakukan pemagangan di Pengusaha-Pengusaha Mebel di Kabupaten Jepara.

- b. Pemberian beasiswa bagi pelaku usaha mebel

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa program kegiatan pemberian beasiswa oleh Pemerintah Kabupaten Jepara baru dilaksanakan pada tahun 2024 setelah mulai terjadi krisis regenerasi pengusaha dan pengrajin mebel seni ukir. Pemberian beasiswa diharapkan dapat menghidupkan kembali regenerasi seni ukir. Beasiswa-beasiswa tersebut berasal dari anggaran pemerintah dan kedepan diharapkan sektor swasta mampu berkontribusi dalam pemberian beasiswa ini melalui program CSR. Kemudian tidak

ada alur khusus dalam akses beasiswa ini karena beasiswa sudah difokuskan target pemberiannya.

- c. Pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang industri mebel.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa strategi pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang industri mebel yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dilakukan dengan berfokus pada 5 aspek yaitu aspek Sumber Daya Manusia dengan keberadaan pelatihan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas SDM, kemudian aspek pasar, kualitas produk, perluasan jaringan bisnis, dan aspek competitor. Strategi-strategi tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan hasil pendampingan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan para pengusaha mebel seni ukir dan hasil evaluasi dari pelaksanaan pelatihan sebelumnya.

Hal-hal tersebut dilakukan untuk menjaga eksistensi dari industri mebel itu sendiri, meskipun terkadang peserta pelatihan menganggap pelatihan sebagai formalitas saja. Strategi tersebut juga dilaksanakan secara berkelanjutan dengan komitmen segala pihak.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara Pada Program Peningkatan Keterampilan Dalam Berbagai Pendidikan Dan Pelatihan

Dalam penelitian ini, keberhasilan pelaksanaan implementasi sebuah kebijakan tentu saja dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Edward III (dalam Mubarak et al., 2020) menjelaskan bahwa terdapat 4 variabel yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan yaitu:

a. Struktur birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat diketahui bahwa dari segi struktur birokrasi, dalam implementasi kebijakan pelatihan dan pendidikan untuk pengusaha mebel, Pemerintah Kabupaten Jepara telah memiliki SOP pengajuan pelatihan dan pelaksanaan kegiatan dan SOP tersebut dijadikan pedoman dalam proses pelayanan yang diberikan serta dipantau dan dapat dievaluasi masyarakat melalui Survei kepuasan masyarakat.

b. Sumber daya

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dari variable sumberdaya, Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki sumber daya finansial yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan

Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara Pada Program Peningkatan Keterampilan Dalam Berbagai Pendidikan Dan Pelatihan.

c. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Jepara dan Pelaku usaha mebel seni ukir sampai dengan saat wawancara dilakukan berlangsung dengan baik. Bahkan terdapat asosiasi HIMKI yang memudahkan proses komunikasi baik penyampaian informasi maupun aspirasi. Komunikasi dilaksanakan dengan rutin melalui forum-forum publik bahkan pada saat penyelenggaraan pameran.

d. Disposisi

Berdasarkan penelitian pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen kuat untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara. Berbagai kegiatan telah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, akan tetapi minat masyarakat justru mengalami penurunan akhir-akhir ini. Kemudian masih terdapat evaluasi dalam keberlanjutan program tersebut berkaitan dengan perlindungan

eksistensi dari para pengusaha mebel itu sendiri.

e. Lingkungan sosial dan ekonomi

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa kendala utama yang menyebabkan penurunan minat adalah upah dari usaha mebel yang rendah, modal usaha yang besar, dan kurangnya kemampuan ukir pata generasi muda Kabupaten Jepara. Oleh karena itu telah dilakukan penyampaian aspirasi pada MPR RI terkait upaya pelestarian mebel seni ukir Jepara dimana hasil aspirasi tersebut menghasilkan beberapa rencana:

1. Menjadikan pelestarian seni ukir ini akan menjadi prioritas
2. Rencana untuk pemberian insentif bagi tukang ukir, bantuan pendidikan untuk anak tukang ukir,
3. Pendirian Lembaga pelatihan
4. Pendirian museum sampai
5. Bantuan untuk mereka yang mau belajar seni ukir.

PENUTUP

Kesimpulan

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara Pada Program Peningkatan Keterampilan Dalam Berbagai Pendidikan Dan Pelatihan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, proses implementasi dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikatakan sudah cukup baik meskipun masih terdapat kekurangan dan ketidakefektifan karena program-program dan kegiatan yang cenderung monoton dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- a. Pengembangan program pelatihan dan pemagangan, pada kegiatan ini Pemerintah Kabupaten Jepara telah berusaha untuk mengadakan berbagai macam pelatihan serta membuka jurusan khusus seni ukir di SMKN 2 Jepara selanjutnya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara tersebut dikembangkan lagi dengan keberadaan pembinaan secara rutin serta peningkatan Kerjasama dengan stakeholder terkait termasuk Kerjasama untuk proses pemagangan siswa siswi dari jurusan seni ukir di SMKN 2 Jepara. Akan tetapi partisipasi dan minat dari pelaku usaha mebel menurun sehingga partisipasi pelaku usaha mebel dapat dikatakan rendah
- b. Pemberian beasiswa bagi pelaku usaha mebel untuk mendapatkan pendidikan di bidang permeblean, pada kegiatan ini proses pelaksanaan belum optimal karena baru saja dilaksanakan pada tahun 2024 serta tidak ada SOP yang

jelas terkait permohonan maupun pemberian Beasiswa bagi pelaku usaha mebel;

- c. Pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang industri mebel, pada kegiatan ini Pemerintah Kabupaten Jepara telah menyusun strategi pengembangan pelatihan kewirausahaan dengan memperhatikan aspek kualitas SDM, kemudian aspek pasar, kualitas produk, perluasan jaringan bisnis, dan aspek competitor.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara Pada Program Peningkatan Keterampilan Dalam Berbagai Pendidikan Dan Pelatihan

Adapun aspek atau faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam rangka mendukung Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara dari segi positif dipengaruhi oleh keberadaan SOP yang jelas dan mudah diakses, ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program, komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait namun kurang

menyentuh generasi muda, dan komitmen dari Pemerintah Jepara yang cukup kuat. Akan tetapi terdapat faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu minat generasi muda yang cenderung menurun akibat faktor lingkungan sosial dan ekonomi dimana upah di pabrik lebih menjanjikan daripada usaha mebel, sulitnya pemasaran, serta Tingkat pendidikan yang berpengaruh.

Saran

1. Saran bagi Pemerintah dan Swasta dalam proses peningkatan peran:
 - a. Pemerintah Kabupaten Jepara khususnya DISPERINDAG Kabupaten Jepara memerlukan strategi baru untuk menarik minat pengusaha mebel untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan. Contohnya: bekerjasama dengan *influencer* yang berkaitan dengan industri mebel, memberikan insentif bagi mereka yang mengikuti program pelatihan dan pendidikan, atau memberikan sosialisasi secara berkala secara langsung ke setiap wilayah Kabupaten Jepara;
 - b. Perlu adanya pembuatan SOP pengajuan beasiswa bagi pengusaha mebel yang ingin melanjutkan pendidikan
 - c. Pemerintah perlu memprioritaskan pemberian pendanaan dan insentif bagi UMKM dan mendorong Kerjasama dengan swasta untuk berkontribusi lebih melalui CSR dalam pendanaan program

pelatihan atau pemasaran produk, peningkatan Kerjasama dalam kemitraan dan penggunaan teknologi serta inovasi pengembangan usaha mebel seni ukir;

2. Saran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan regenerasi pengerajin usaha mebel seni ukir adalah sebagai berikut:

- a. Perlu adanya sosialisasi yang masif dan memastikan bahwa informasi sosialisasi terkait program pelatihan dan pendidikan dalam upaya pelestarian usaha mebel dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- b. Pemanfaatan teknologi dalam menginformasikan industri mebel, contohnya membuat iklan masyarakat terkait industri mebel bekerjasama dengan influencer dan diposting pada seluruh media sosial Pemerintah Kabupaten Jepara maupun sosial media milik influencer contohnya IG, Tiktok, maupun AI, dll mengadakan pelatihan digital marketing untuk umum dan sekolah Tingkat SMA/SMK; atau perlu berkolaborasi dengan SMK dan BLK setempat
- c. Pemerintah perlu membentuk sistem monitoring setelah pelatihan
- d. Mengembangkan inovasi bentuk pelatihan dan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh: mengadakan pelatihan online yang

berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan menghadirkan influencer yang dapat menarik minat generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmada, S. (2023, June 27). Pamuja Jepara, Gencarkan Industri Ukir Berbasis Online Tembus 61 Negara. *Gistara.Com*.
- Aristita, S., & Witasari, N. (2020). SEJARAH SEKOLAH MENENGAH INDUSTRI KERAJINAN NEGERI JEPARA/SMKN 2 JEPARA TAHUN 1980-2000. *Journal of Indonesian History*, 9(2), 154–161.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2019). *Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Budidaya di Provinsi Jawa Tengah, 2019*. Jateng.Bps.Go.Id.
- BPS Kab. Jepara. (2019). *Banyaknya Sentra Industri Kecil di Kabupaten Jepara*. <https://Jeparakab.Bps.Go.Id/>.
- BPS Kabupaten Jepara. (2024). *Kabupaten Jepara dalam Angka, 2024: Vol. Kab. Jepar*.
- Consulting, A. (2024). *Apa itu Pelatihan Magang?* <https://Alp.Consulting>.
- Creswell, J. W. (2009). RESEARCH DESIGN Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Intercultural Education* (Third Edit). Sage Publications.
- Fatyandri, N. A., Susanto, S., Angeline, F., Richelle Chan, K., Go, M., & Surya, P. (2023). Analisa Kompetitor hingga Dinamika Kompetitif pada Bisnis Kafe Catarina. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 220–229.
- Guruh Suksmono Aji, & Iva Khoiril Mala. (2024). Meningkatkan Kualitas SDM Untuk Mencapai Keunggulan Kompetitif Perusahaan di Era Digital: Tren, Inovasi, dan Tantangan. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(3), 01–17.
- Kristiana, D. (2017). Pengenalan Berbagai Jenis Furniture Sengan Kombinasi Material Besarta Kontrusinya. *JURNAL UNIVERSITAS SAHID SURAKARTA*.
- Mada. (2024). CEK! Ini Link Aplikasi untuk Pelaku UMKM Agar Bisa Akses Progam Pelatihan Diskopukmnakertrans Jepara. *Halojepara.Id*.
- Marselina, R. D., Al Hafizh, H., & Triyana, T. (2024). Analisis Jaringan Bisnis Untuk Meningkatkan dan Mengembangkan Fashion Sabhira. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 2615–2622.

- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*, 005(01), 33–38.
- Nayunda, A., Nur, F., Fitriyah, & Rina, M. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Lokal Industri Mebel Di Kabupaten Jepara. *Undip E-Journal*, 02.
- Nurfaizah, U. (2024, March 28). Siap-Siap! Pemkab Jepara Bakal Buka 14 Pelatihan Bagi 700 Warga. *Betanews.Id*, 1.
- Oktavianus, S. Y. dan. (2015). Sejarah Mebel Jepara. *Design Interior Department, School of Design, BINUS University*.
- Pemerintah Kabupaten Jepara. (2024). Terus Meningkatkan, Nilai Ekspor Furniture Kayu Jepara Tembus 302,7 Juta Dollar. *Bupatijepara.Id*.
- Perdana, A. P. (2021, November 13). Minat Pemuda Jepara pada Seni Ukir Kian Tergerus, Regenerasi Terancam. *Kompas.Id*.
- Petrus. (2025). Audiensi HIMKI, DPRD Jepara Siap Dorong Pengembangan Industri Mebel.
- Purwanto, F. (2021). Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Lipstik Revlon Yogyakarta. *Thesis*, 1–23.
- Ripley, R. B. and G. A. F. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy, Second Edition*. The Dorsey Press.
- Rohmah, N. S., & Salam, R. (2022). Regenerasi Pengukir Muda dalam Keberlanjutan Industri Seni Ukir di Desa Mulyoharjo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. *Sosiolum*, 4(2), 81–89.